

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha.
- Diana Napitupulu. (2010). *KPK in Action*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Dwi Novianto. (2019). *Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa*. Kalimantan Barat. CV Ferwati Press.
- Eddy O.S. Hiariej. (2009). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Evi Hartanti. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. (2009). *Tindak Pidana Korupsi. Ed.2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jawade Hafidz Arsyad. (2017). *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moeljatno. (2005). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhamad Mu'iz Raharjo. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Arto, (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Robert Klitgaard. (2001). *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Romli Atmasasmita. (2004). *Sekitar Korupsi Aspek Nasional Dan Aspek Internasional*. Bandung :CV Mandar Maju.
- Rohmidhi Srikusuma. (2023). *Regulasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Damera Press.
- Sudarsono. (2009). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____ dan Bambang Sugiri. (2017). *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative.

Wirjono Prodjodikoro.(2002). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. Cet. ke-5.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sumber Lainnya :

Ahmad. Z. (2016). *Faktor-faktor penyebab korupsi*. Diakses tanggal 20 Mei 2025. Doi : https://www.kompasiana.com/zurul_98/57ee2a6ab37e61951464bfe4/faktorfaktor-penyebab-korupsi?page=all.

Fathur Rahman. Achmad Baidhowi. Dan Ruth Agnesia. (2015). Sembiring. *Pola Jaringan Korupsi Di Tingkat Pemerintahan Desa*. *Integritas*. Vol.4 . No. 1. Juni.

Ghani. M. F. I.. & Saputra. G. (2025). *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa dan Strategi Pemberantasannya di Indonesia*. *Journal Terekam Jejak (JTJ)*. Vol. 3. Num. 2.. hlm. 24. Diakses tanggal 20 Juni 2026. <https://doi.org/10.5281/>

Nugraha. A. Z. (2026). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Volume 2. Nomor 2. Diakses tanggal 20 Juni 2026. hlm. 595-605. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/1178>

Prayudi. A. D. (2020). *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan alokasi dana desa oleh Kepala desa* (Bachelor's thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta). Diakses tanggal 20 Juni 2026. <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desarugikan-negara-rp-406-miliar?page=all>

Tri Andrisman. (2009). *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung:Unila. hlm.8. diakses tanggal 20 Mei 2026. Doi : <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/4265>

Yan Pramadya Puspa. (1997). *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda*. Jakarta : Inggris dan Indonesia PT. Aneka Ilmu Semarang. hlm 602. Diakses tanggal 20 Mei 2026. Doi : <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/3664>

Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonti. (2015). *Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa, Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*. Vol,0 No.3, Desember. hlm 434. Diakses tanggal 20 Mei 2026. <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnaliUS>